
Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Yohanis Polce Lio

Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Yogyakarta

E-mail: yohanispolce@gmail.com

Article History:

Received: 27 Mei 2022

Revised: 30 Mei 2022

Accepted: 18 Juni 2022

Keywords: Strategi,
Pemberdayaan, Kelompok
Tani

Abstract: Strategi pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa terlebih khusus untuk kelompok tani merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), menguatkan potensi yang ada serta melindungi kelompok tani dengan membentuk dan merubah perilaku masyarakat melalui pengembangan potensi-potensi yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya kelompok tani di Desa Mautenda Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Teknik penentuan informan yaitu purposive sampling. Data diperoleh melalui pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data dilakukan melalui tahap triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menciptakan suasana untuk mengembangkan potensi desa khususnya kelompok tani, pemerintah telah mendatangkan pihak penyuluh untuk membantu dalam meningkatkan pemahaman kelompok tani agar dapat mengembangkan potensi yang ada. Selain itu, strategi pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani dengan memperkuat potensi yang ada dan melindungi kelompok tani dari berbagai persaingan yang terjadi pemerintah desa sudah melakukan monitoring dan sosialisasi dengan tujuan agar kelompok tani lebih sejahtera.

PENDAHULUAN

Dengan adanya otonomi daerah, salah satu komponen yang penting untuk dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015, pelaksanaan Undang-Undang tersebut pada pasal 1 ayat 1 memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan persyaratan yang diamanatkan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Langi, 2015). Ruh atau semangat dari terbitnya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 adalah kemandirian Desa.

Desa mempunyai kekuatan secara ekonomi, sosial, dan budaya melalui usaha-usaha pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Maka, dengan lahirnya UU Desa tersebut, kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, campuran antara self governing community dan local self government, bukan lagi sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Desa memiliki posisi dan peran yang lebih berdaulat, sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus Desa (Ra'is : 2018). Sektor Pertanian masih menjadi salah satu prioritas yang mendapat perhatian pemerintah, karena tumbuh kembangnya sektor pertanian salah satu kunci pembangunan nasional (Saheb, Slamet dan Zuber, 2018). Namun, selama ini pertumbuhan positif sektor Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia. Pertanian juga memberikan sumbangsih yang konkrit dalam penggunaan bahan baku industri maupun penyerapan tenaga kerja yang nantinya akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga pelestarian lingkungan.

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pesat, semakin besar pula kemungkinan kebutuhan manusia yang tidak terbatas untuk bisa terpenuhi. Khususnya bagi masyarakat pedesaan yang masih memiliki lahan pertanian dan tidak mempunyai keahlian lain ataupun golongan pendidikan masih minim maka secara tidak langsung untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara memanfaatkan lahan pertanian yang ada. Kelompok tani merupakan terobosan yang cocok atau tepat bagi masyarakat di Desa Mautenda, terutama yang potensi utamanya dari sektor pertanian. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usaha taninya dan meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya.

Kelompok tani itu sendiri juga merupakan ujung tombak keberhasilan dalam sebuah pembangunan sektor pertanian. Namun, Kelompok Tani di desa Mautenda yaitu Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), seiring berjalannya waktu Gapoktan tersebut mulai berjalan tidak lancar sesuai yang diharapkan (dalam artian Kelompok Tani tersebut mati atau tidak sehat). Faktor penyebab tidak berjalannya kelompok tani itu sendiri adalah masalah internal dan eksternal dalam lembaga kelompok tani tersebut. Masalah internal meliputi strukturisasi maupun regenerasi kepemimpinan yang tidak jelas (simpang-siur) sehingga program pengadaan infrastruktur terkait sarana dan prasarana maupun biaya operasional. Sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Adapun masalah eksternal yaitu kelompok tani sendiri kurang melakukan pendekatan dengan pemerintah setempat. Hal ini menyebabkan kelompok tani di Desa Mautenda sendiri tidak bisa maju.

Strategi pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa terfokus pada kelompok tani yaitu dengan langkah atau cara untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM), menguatkan potensi yang ada serta melindungi kelompok tani yaitu membina dan merubah perilaku masyarakat melalui pengembangan potensi-potensi yang dimiliki. Petani dalam hal ini merupakan pelaku utama harus diberdayakan. Berbagai cara pemberdayaan masyarakat petani perlu disusun atau dirancang dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat petani secara optimal. Aplikasi pemberdayaan masyarakat harus tepat pada target (petani) supaya mampu meningkatkan kemampuan personal yang ada, kemudian secara terstruktur dan berfokus pada keperluan masyarakat, baik dalam layanan perorangan maupun kelompok.

Dalam pengamatan peneliti, kelompok tani di Desa Mautenda itu sendiri belum berjalan dengan baik dengan kata lain bisa dikatakan belum bisa maju tanpa campur tangan dari pemerintah

desa atau kepala desa tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti merasa sangat tertarik dalam melaksanakan penelitian di Desa Mautenda, dengan tujuan dapat membantu pihak pemerintah desa Mautenda dalam menyusun, merencanakan maupun mengevaluasi setiap kegiatan maupun program yang sudah dijalankan melalui hasil-hasil bidang pertanian sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama demi kemajuan desa tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada dikalangan masyarakat mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan terkait strategi pemberdayaan kelompok tani pada desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga problem di dalam kalangan masyarakat dapat dipahami (Sugiyono, 2015:15). Fokus penelitian menurut Spradley dalam Bukunya Sugiyono (2015:286) menyatakan bahwa fokus penelitian adalah fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.

Dengan demikian fokus penelitian adalah strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan potensi terhadap kelompok tani. Informan dalam Penelitian ini terdiri atas: Kepala Desa (Yohanes Seko Padi, SH), Kepala Badan Pembinaan Pertanian Wewaria (Feliks Meko, SST kepala BPP), dan Pengurus Kelompok Tani (Ambrosius Geli ketua GAPOKTAN). Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan tiga teknik analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Potensi

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah tindakan pelimpahan atau pemberian kekuatan (Power) yang akan menghasilkan hirarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan. Pemberdayaan mewujudkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Masyarakat menjadi pelaku utama sekaligus tujuan (people centre). Melalui upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah mencoba untuk membangun kesadaran kritis masyarakat tentang makna dan tujuan pembangunan. Masyarakat didorong bersedia untuk belajar memahami beragam hal yang mempengaruhi dampak pembangunan bagi masyarakat dan lingkungan (Ra'is : 2018).

Konsep mengenai pemberdayaan suatu masyarakat tidak terlepas dengan potensi yang terkandung didalamnya. Desa Mautenda adalah salah satu desa di kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Secara administratif, Desa Mautenda terdiri dari 7 dusun yaitu : dusun Tendaleo, Aegana, Nuaseko I, Nuaseko II, Nuaseko III, Watujuke, dan terakhir dusun Aeloga. Sebagai pusat kecamatan Wewaria, pembangunan fasilitas di Desa Wewaria berkembang secara lumayan pesat. Desa Wewaria juga mempunyai potensi dibidang pertanian dan peternakan. Disamping menyimpan potensi alam, Desa Mautena juga mempunyai potensi dalam bidang seni dan budaya, hal tersebut diindikasikan dengan banyaknya kegiatan adat seperti upacara adat "PO,O PEKA" (acara syukuran terimakasih kepada tuhan dan roh nenek moyang atas hasil pertanian) yang diselenggarakan tiap tahunnya. Beberapa ulasan mengenai lemahnya potensi kelompok tani yang kurang diberdayakan oleh pemerintah desa yang terjadi pada desa Mautenda, Kecamatan Wewaria. Berdasarkan temuan peneliti dari hasil observasi dan wawancara maka dapat diketahui strategi pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani di Desa Mautenda,

Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. *Menciptakan Suasana (Iklim) Yang Memungkinkan Potensi Masyarakat Berkembang*

Peran pemerintah desa dalam hal ini menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi kelompok tani berkembang secara optimal. Pemberdayaan terhadap kelompok tani melalui beberapa cara yaitu pemerintah desa itu sendiri sudah melakukan sosialisasi dan mendatangkan pihak penyuluh atau tenaga ahli mampu mengatasi masalah internal organisasi kelembagaan tersebut. Tidak terlepas dari itu pemerintah desa juga harus menyiapkan sarana dan prasarana serta biaya operasional untuk penyuluh untuk mendukung keberhasilan kelompok tani. Pemerintah aparat desa juga melakukan pengawasan meskipun dalam pelaksanaannya tidak menentu. Terkadang pengawasan dilakukan hanya beberapa kali dalam setahun. Strategi yang diterapkan merupakan terobosan dan langkah yang diambil aparat pemerintah desa terhadap pemberdayaan kelompok tani dimana disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani itu sendiri. Tidak terlepas dari itu, pemberdayaan kelompok tani sangat dibutuhkan tingkat kesadaran dan partisipasi dari berbagai pihak agar kelompok tani bisa diberdayakan.

Dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah desa dalam memberdayakan kelompok tani itu terlaksana dengan baik perlu adanya motivasi terhadap kelompok tani dan kerjasama antara baik dari pemerintah desa, pengurus kelompok tani dan tokoh masyarakat. Untuk menjawab hal tersebut pemerintah desa harus menyiapkan sarana dan prasarana serta dana atau biaya operasional untuk menunjang pemberdayaan kelompok tani. Pemerintah desa juga mendatangkan tenaga ahli, melakukan penyuluhan terhadap kelompok tani dan melakukan gerakan kesadaran organisasi terkait regenerasi kelembagaan kelompok tani sehingga kedepannya organisasi ini bisa maju dan berdaya guna bagi masyarakat setempat. Dari hasil observasi peneliti terlihat bahwa upaya atau strategi yang dilakukan pemerintah desa terhadap pemberdayaan kelompok tani sudah terlaksana dengan baik meskipun belum sesuai yang diharapkan.

2. *Meningkatkan Kapasitas Dengan Memperkuat Potensi Atau Daya Yang Dimiliki Oleh Masyarakat.*

Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani yaitu dengan meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang ada. Sejauh ini strategi dari pemerintah desa itu ada, misalnya pemerintah desa juga memberikan pelatihan dan bimbingan terhadap kelompok tani agar dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Sejatinya dalam memberdayakan kelompok tani agar bisa maju pemerintah desa harus bisa meningkatkan kapasitas dan memperkuat potensi sesuai apa yang dibutuhkan kelompok tani. Strategi yang pemerintah desa yang diterapkan dari desa merupakan hasil keputusan bersama dan sesuai kebutuhan kelompok tani. Upaya yang pemerintah desa lakukan adalah mensosialisasikan tentang bagaimana pola pikir kelompok tani dalam memperkuat potensi yang ada. Hasil keputusan bersama dari pemerintah desa merupakan sebagai langkah dalam meningkatkan kapasitas dalam memperkuat potensi kelompok tani. Potensi kelompok tani itu harus dikembangkan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat tani agar hidup mereka lebih sejahtera.

Keberlanjutan lembaga kelompok tani harus menjadi suatu prioritas yang diperhitungkan bagi masyarakat tani pada umumnya. Sehingga dengan cara atau strategi yang

dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pemberdayaan kelompok tani dapat meningkatkan kapasitas kelompok tani. Strategi atau cara yang diambil oleh aparat pemerintah desa itu adalah melakukan pengontrolan dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani. Tapi realitanya, dilihat bahwa kegiatan kelompok tani itu tidak berjalan dengan baik atau bisa dikatakan tidak sehat. Langkah atau tindakan yang diambil oleh aparat pemerintah desa itu dengan tujuan membantu para kelompok tani agar kegiatan yang dilakukan dapat terealisasi dengan baik. Sehingga kelompok tani dapat diberdayakan. Dari hasil observasi peneliti bahwa strategi pemerintah desa sejauh ini sudah melakukan pemberdayaan terhadap kelompok tani yakni sudah berjalan maksimal sesuai tujuan yang diharapkan.

3. Melindungi Kepentingan Dengan Meningkatkan Sistem Perlindungan Bagi Masyarakat Yang Menjadi Subyek Pengembangan

Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dapat diartikan sebagai cara atau langkah yang dilakukan pemerintah desa untuk mencegah terjadinya persaingan yang ketat antara kaum lemah dan kuat. Pemerintah Desa sejauh ini memang belum maksimal dalam melakukan perlindungan bagi kelompok tani dalam artian masih banyak bidang yang harus kami perhatikan. Butuh proses dan tahapan dalam membenahi kepengurusan kelompok tani. Perlindungan dari aparat pemerintah desa itu ada namun pemerintah desa masih fokus pada beberapa bidang lain yang namun tidak menutupi kemungkinan tetap memperhatikan bidang pertanian. Aparatur desa sudah melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang kelompok tani jalankan. Monitoring yang pemerintah desa lakukan itu sesuai kebutuhan lembaga kelompok tani. Monitoring dari aparat pemerintah desa dengan tujuan perlindungan terhadap kelompok tani semakin baik.

Strategi yang aparat desa terapkan itu merupakan sebuah langkah menuju perubahan dalam bidang pertanian. Intinya bahwa monitoring yang dilakukan aparat pemerintah desa belum maksimal. Pemerintah desa sudah melakukan perlindungan terhadap kelompok tani. Namun, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tersebut belum berjalan maksimal sesuai yang diharapkan. Terlaksananya pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan oleh pemerintah desa itu tergantung pada kesadaran antara pengurus kelompok tani, tokoh masyarakat dan bersifat transparansi terhadap aparat pemerintah desa. Dari hasil observasi peneliti bahwa strategi yang dilakukan pemerintah desa terhadap pemberdayaan terhadap kelompok tani sejauh ini sudah berjalan dengan baik namun belum mencapai target yang diharapkan. Dari berbagai ulasan diatas, peneliti akan menguraikan faktor penghambat dan pendukung Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani sebagai berikut:

• Faktor Penghambat

Strategi pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan terhadap kelompok tani, tidak semuanya seperti yang diinginkan oleh aparat desa. Oleh karena itu, ada yang mendukung adapula yang dapat menjadi penghambat strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani. Ada faktor yang menjadi kendala utama dalam pemberdayaan kelompok tani oleh pemerintah desa seperti belum adanya kesadaran untuk partisipasi, motivasi diri dan mindset (pola pikir) dari kelompok tani.

- **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung merupakan factor yang mendukung proses suatu pemberdayaan kelompok tani oleh Pemerintah Desa. Dapat diartikan bahwa faktor tersebut dapat menunjang terhadap proses pemberdayaan, sehingga dapat berjalan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara, faktor Pendukung itu sendiri adalah adanya dukungan dari fasilitas penyuluh, sehingga dapat membantu Pemerintah Desa dalam melakukan penyuluhan. Faktor pendukung lain adalah diperlukan dana misalnya biaya operasional penyuluh yang masih perlu ditingkatkan. Dari hasil observasi peneliti bahwa faktor pendukung strategi pemerintah desa adalah fasilitas dan dana operational. Tujuannya adalah untuk pemberdayaan terhadap kelompok tani dimana sejauh ini sudah terlaksana dan sangat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas sesuai program yang dirancang. Faktor pendukung lain yaitu pemerintah desa sendiri, yang mana bekerja sama, baik dengan penyuluh yang dihadirkan oleh desa dan bekerja sama dengan pihak aparat desa. Hadirnya penyuluh pertanian sangat membantu pemerintah dalam mengembangkan kapasitas kelompok tani dengan potensi yang ada.

KESIMPULAN

Dalam menciptakan suasana untuk mengembangkan potensi desa khususnya kelompok tani pemerintah telah mendatangkan penyuluh untuk membantu dalam meningkatkan pemahaman kelompok tani untuk mengembangkan potensi. Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas kelompok tani dengan memperkuat potensi yang ada dan melindungi kelompok tani dari berbagai persaingan yang terjadi pemerintah desa sudah melakukan monitoring dan sosialisasi dengan tujuan agar kelompok tani lebih sejahtera. Faktor pendukung dan penghambat suksesnya sebuah strategi pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap masyarakat dimana mereka belum sadar akan pentingnya pemberdayaan potensi kelompok tani.

DAFTAR REFERENSI

- Langi, Jova Engelina. 2015. *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan (Studi kasus di desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan)*. Jurnal Politico Vol 2, No 6 (2015), diakses 28 Juni 2018.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UndangUndang Desa
- Ra'is, D.U., 2018. *Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undangdesa Nomor 6 Tahun 2014*. REFORMASI, 7(1).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa